



RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT KEUANGAN CIMAHI

TAHUN 2015 - 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahunan sangat diperlukan untuk memperjelas arah yang ingin dicapai Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi dengan cara yang efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan konsekuensi masa depan. Rencana strategis ini juga dapat menjadi landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan, menggunakan kekeluasaan yang maksimum terhadap bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, memecahkan masalah utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, serta membangun kerja kelompok dan keahlian. Mengingat pentingnya perencanaan strategis tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk periode lima tahun.

Rencana strategis tersebut disusun dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja dan akuntabilitas seperti diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2002 tentang Akuntabilitas dan Indikator Kinerja dan RPJMN tahun 2014-2019. Selain Kepmen tersebut, dasar penyusunan Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Oleh karena itu, rencana strategis tersebut akan memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran utama, kebijakan dan program-program dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Program-program yang terukur tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah jangka pendek (1 tahun) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Kementerian Keuangan sebagai salah satu kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fiskal dan Bendahara Umum Negara (BUN), menjabarkan Renja K/L kedalam Program Kerja Unit Organisasi (Eselon I), untuk dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada tingkat satuan kerja (satker).

Perumusan program dan kegiatan tersebut mengacu kepada visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan satuan kerja. Selanjutnya, sesuai kebijakan penganggaran pemerintah, satuan kerja di lingkungan unit organisasi BPPK Kementerian Keuangan akan melaksanakan kegiatan sesuai alokasi anggaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bab ini memaparkan kondisi umum Balai Diklat Keuangan Cimahi yang merupakan penggambaran umum berkenaan dengan capaian atas renstra periode 2010-2014.

1.1. Kondisi Umum

Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi telah menetapkan rencana strategis tahun 2010-2014 dengan visi menjadi pengelola diklat terunggul dan dipercaya masyarakat dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara di daerah. Dalam mewujudkan visi tersebut, BDK Cimahi menetapkan beberapa misi antara lain: 1) melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan di wilayah Jawa Barat dan Banten; 2) meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta Keuangan dan Kekayaan Negara di wilayah Jawa Barat dan Banten; 3) Menuntaskan reformasi birokrasi BPPK dan menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik (*good governance*) di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut, BDK Cimahi menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan dan kekayaan negara berkualitas.
- b. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang terdepan dengan tata kelola yang baik.

Berikut rincian pencapaian untuk setiap tujuan dan sasaran tersebut:

1.1.1. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan dan kekayaan negara berkualitas.

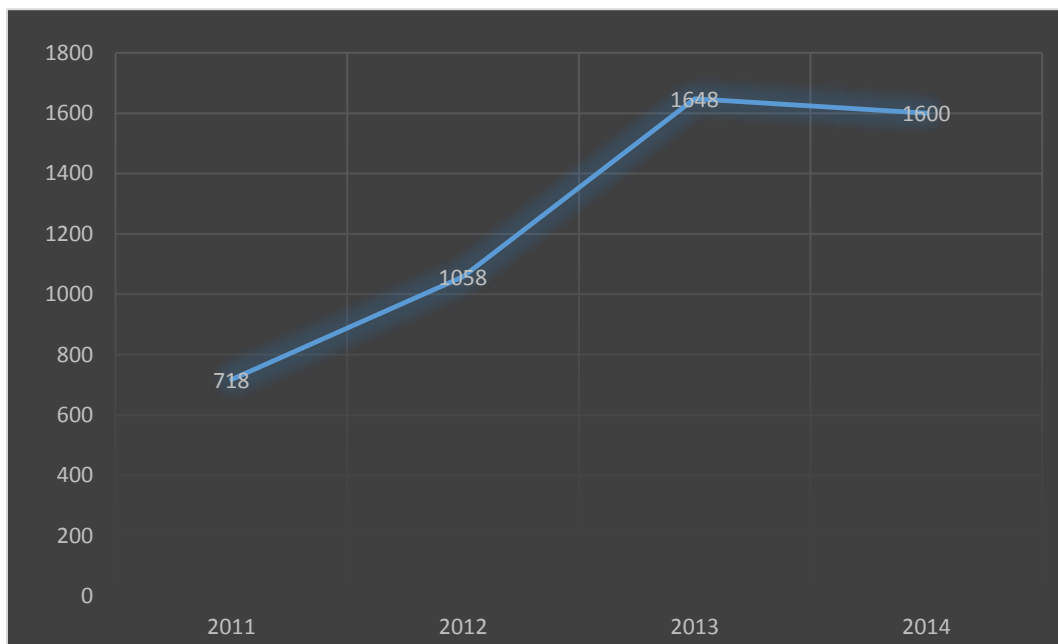
- a. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi melalui Penelitian dan Pemutakhiran Data Kebutuhan Diklat.
 - 1) BDK Cimahi telah melaksanakan kegiatan survey terhadap unit Kementerian Keuangan di lingkup Jawa Barat dan Banten pada tahun 2013 dengan tujuan agar BDK dapat mengakomodasi kebutuhan unit pengguna. BDK Cimahi juga melakukan koordinasi dengan seluruh Pusdiklat terkait hasil survey yang telah diperoleh.
 - 2) BDK Cimahi telah memenuhi target rasio jam pelatihan terhadap jam kerja Kementerian Keuangan. Capaian kinerja IKU jamlator dan nilai peningkatan kompetensi SDM dapat dilihat sebagai berikut:

Capaian IKU Jamlator Balai Diklat Keuangan Cimahi

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2011	0,0592%	0,0769%	129,9%
2.	2012	0,1252%	0,1049%	83,8%
3.	2013	0,1112%	0,1337%	120,2%
4.	2014	0,1004%	0,1074%	107%

- 3) Jumlah SDM pengelola keuangan negara yang mengikuti diklat menunjukkan peningkatan setiap tahun. Rincian capaian peserta yang mengikuti diklat di BDK Cimahi dapat dilihat sebagai berikut:

Peningkatan Kuantitas Peserta Diklat di BDK Cimahi



- 4) Untuk menunjang ketersediaan fasilitas, BDK Cimahi berupaya untuk menambah sarana dan prasarana, baik berupa ruang kelas, asrama, maupun meja kursi, LCD proyektor dan fasilitas pendukung lainnya. Adapun data tanah dan gedung BDK Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tanah dan Gedung Milik BDK Cimahi

No	Tanah / Gedung / Bangunan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	5.470	m ²	Lokasi di Cimahi
2	Tanah	1.240	m ²	Lokasi di Cimahi
3	Tanah	6.080	m ²	Lokasi di Cirebon
4	Gedung Perkantoran	3.955	m ²	Lokasi di Cimahi
5	Gedung Mess	440	m ²	Lokasi di Cimahi
6	Gedung Perkantoran dan Asrama	2.035	m ²	Lokasi di Cirebon
6	Gedung Asrama	1	Unit	Lokasi di Cimahi 30 kamar & 2 kamar VIP
7	Mess	8	Unit	Lokasi di Cimahi 18 kamar

- b. Capaian BDK Cimahi dalam mewujudkan evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah:

BDK Cimahi telah melaksanakan kegiatan evaluasi diklat yang menghasilkan berbagai rekomendasi diklat sejak tahun 2011. BDK Cimahi melaksanakan evaluasi dan rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1.1.2. Menjadi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan yang Terdepan Dengan Tata Kelola Yang Baik

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Beberapa hal yang telah dicapai adalah:

- 1) BDK Cimahi telah menggunakan fasilitas *video conference* dalam penyelenggaraan rapat, baik rapat dengan unit-unit di lingkungan BPPK maupun dengan pihak luar BPPK sejak tahun 2012 sehingga mengefisienkan kegiatan-kegiatan tersebut.
- 2) BDK Cimahi telah memanfaatkan intranet BPPK yang bernama *Communication Media for Education and Training* (COMET) dalam berbagi informasi antar pegawai BPPK sejak tahun 2012.

- b. Capaian BDK Cimahi dalam menerapkan manajemen SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, professional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab adalah:
- 1) BDK Cimahi melaksanakan program budaya Kementerian Keuangan dan melakukan monitoring setahun sekali sejak tahun 2013.
 - 2) BDK Cimahi telah menerapkan kode etik pegawai sejak tahun 2010 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Capaian-capaian dalam mewujudkan akuntabilitas sistem manajemen keuangan sebagai berikut:

Capaian IKU Persentase penyerapan DIPA BDK Cimahi dari tahun 2011 - 2014 adalah sebagai berikut:

Capaian IKU persentase penyerapan DIPA

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2011	80%	89%	111,25%
2.	2012	95%	96,55%	101,63%
3.	2013	95%	97,07%	102,18%
4.	2014	95%	99,78%	105,03%

- d. BDK Cimahi juga telah memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dalam negeri dengan mengadakan kerja sama diklat terkait dengan keuangan negara, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Ham serta Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

1.1.3. Aspirasi Pengguna Layanan BDK Cimahi

BDK Cimahi merupakan unit pelaksana teknis setingkat eselon III yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara di daerah, khususnya Jawa Barat dan Banten. Pengguna layanan utama BDK Cimahi berasal dari unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki unit pelaksana teknis di daerah, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Selain kelima unit tersebut, terdapat satu unit pusat yang pernah melaksanakan diklat di BDK Cimahi, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Lingkup pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan BDK Cimahi meliputi

pengelolaan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

BDK Cimahi memiliki peran dalam mendukung pencapaian target unit-unit eselon I lain dengan memastikan terpenuhinya kompetensi yang dibutuhkan terutama di bidang keuangan negara di daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Terdapat beberapa peluang bagi BDK Cimahi dalam menjalankan peran tersebut antara lain:

- a. Amanat UU ASN yang mewajibkan jam minimal diklat bagi seluruh PNS baik pelaksana operasional maupun manajerial;
- b. Kebutuhan kompetensi pengelolaan keuangan negara bagi aparatur pemerintah , baik pusat maupun daerah yang makin besar;
- c. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan; dan
- d. Berlakunya regulasi dan kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang harus diikuti oleh peningkatan kompetensi SDM.

Potensi yang dimiliki BDK Cimahi untuk dapat menangkap peluang yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi kantor yang terletak tidak jauh dari ibu kota provinsi Jawa Barat;
- b. Memiliki tenaga pengajar yang berlatar belakang kompetensi di bidang perpajakan, anggaran, kebhendahaan umum, bea cukai dan *soft skill*;
- c. Mempunyai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dan non Kementerian Keuangan di lingkup Jawa Barat dan sekitarnya;
- d. Memiliki SDM pengelola diklat yang profesional;
- e. Memiliki fasilitas pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan peserta diklat.

Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan, BDK Cimahi menghadapi tantangan-tantangan seiring dengan berkembangnya tuntutan dan permintaan dari unit pengguna dan para peserta diklat. Tantangan-tantangan tersebut, yaitu:

- a. Sarana prasarana terkait kediklatan yang dimiliki BDK Cimahi masih belum memadai dari sisi kuantitas maupun kualitas, seperti sarana olah raga dan lahan parkir yang kurang memadai;
- b. Karya ilmiah dan penelitian belum pernah dilaksanakan karena belum adanya pengelolaan penelitian dan pengembangan yang terarah dan mendukung pengembangan kompetensi teknis widyaiswara dalam bidang keilmuan yang diampu. Karya ilmiah dan penelitian tersebut memiliki peran dalam

mengembangkan kompetensi keahlian yang bersifat spesialis dan membangun reputasi kepakaran widyaiswara;

- c. Pola harmonisasi diklat masih bersifat sentralisasi antara Pusdiklat dengan unit eselon I lainnya sehingga Balai hanya menunggu hasil harmonisasi tersebut. Hal ini menyebabkan Balai tidak bisa mandiri dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran.

BAB II

VISI DAN MISI

2.1. Visi Balai Diklat Keuangan Cimahi

BDK Cimahi mempunyai peran yang penting diwilayahnya dalam meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, BDK Cimahi menetapkan visi: **Menjadi pengelola pendidikan dan pelatihan terkemuka dalam menghasilkan pengelola keuangan dan kekayaan negara yang profesional dan berkelas dunia di daerah.**

2.2. Misi Balai Diklat Keuangan Cimahi

Dalam menunjang visi baru tersebut, BDK Cimahi menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan di wilayah Jawa Barat dan Banten baik untuk Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan.
2. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pendidikan dan pelatihan SDM di bidang keuangan dan kekayaan negara.
3. Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta Keuangan dan Kekayaan Negara di wilayah Jawa Barat dan Banten.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi BPPK dan menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik (*good governance*) di wilayah Jawa Barat dan Banten.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPPK

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, BPPK mengacu pada salah satu tujuan Kementerian Keuangan, yaitu reformasi birokrasi yang berkesinambungan, perbaikan *governance* dan penguatan lembaga. Sasaran strategis yang menjadi peran BPPK dari arah kebijakan ini adalah SDM yang kompetitif. Sasaran strategis ini dirinci ke dalam beberapa arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPK yaitu:

- Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam konsep *Corporate University* dengan penguatan lembaga pendidikan kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya *link and match* dengan tujuan strategis organisasi.
- Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Arah strategi dan kebijakan Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan diatas diimplementasikan oleh BPPK melalui 5 arah kebijakan dan strategi, yaitu:

1. Terwujudnya organisasi yang *fit for purpose* dalam rangka mengembangkan *Corporate University* di Kementerian Keuangan.
2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna.
3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM.
4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.
5. Tersedianya jaminan kualitas *output* layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Diklat Keuangan Cimahi

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi BPPK, BDK Cimahi telah menetapkan arah kebijakan dengan strategi mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan mendukung *Corporate University* di BPPK yang meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat;
- b. Pengembangan kapasitas SDM BDK Cimahi yang dapat mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan;
- c. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dengan tenaga pengajar yang berkualitas guna memenuhi kompetensi yang dibutuhkan bagi Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan; dan

- d. Menjamin kualitas mutu pelayanan penyelenggaraan diklat yang terukur.

Penjelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan dan strategi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana
Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana disesuaikan dengan standar BPPK sehingga BDK Cimahi dapat memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan unit pengguna. Sarana dan prasarana yang akan dikembangkan mengakomodasi konsep *eco living* dengan tetap memperhatikan tata ruang dan lingkungan serta memperhatikan konsep pengarusutamaan gender (*daycare*, ruang laktasi memadai dan fasilitas khusus penyandang disabilitas).
- b. Pengembangan SDM dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengembangan sebagai berikut :
 - Melakukan *Capacity Building* bagi semua pegawai termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Melakukan pengembangan kompetensi widyaiswara, baik dengan cara mengirim widyaiswara ke unit teknis dalam rangka *On The Job Training* maupun mengirim widyaiswara untuk mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi secara terus menerus;
 - Pengembangan para pengajar non Pegawai BPPK yang dilakukan dengan cara memberikan *Training of Trainer* (ToT) guna meningkatkan kemampuan penyampaian materi dengan lebih baik.
- c. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dengan tenaga pengajar yang berkualitas guna memenuhi kompetensi yang dibutuhkan bagi Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan yang sesuai dengan standardisasi diklat.
- d. Menjamin kualitas mutu pelayanan penyelenggaraan diklat yang terukur dengan menyusun indeks kepuasan layanan yang memadukan antara metode evaluasi yang sudah ada dengan metode *ghost evaluation*.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan strategi sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, BDK Cimahi didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana dan sumber daya aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BDK Cimahi merupakan salah satu unit BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK. BDK Cimahi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran

keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BDK Cimahi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara;
- b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara;
- c. Pengembangan SDM;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara ;
- e. Pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- f. Pelaksanaan administrasi balai;

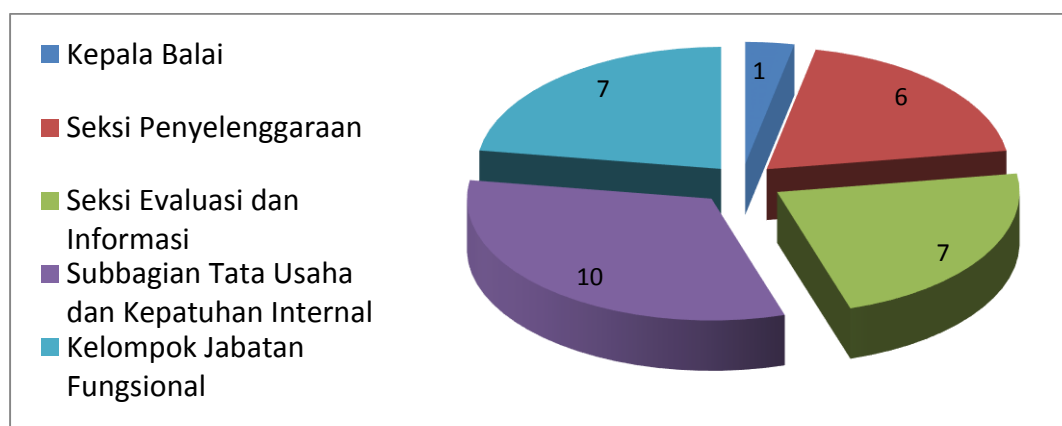
BDK Cimahi terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penyelenggaraan;
3. Seksi Evaluasi dan Informasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

SDM sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh organisasi memiliki peran vital dalam pengembangan sebuah organisasi. Oleh karena itu, SDM perlu untuk dikelola dengan baik sehingga berada dalam kondisi terbaiknya. Pengelolaan SDM bukan hanya terkait soal pengadaan pegawai baru atau pengembangan melalui diklat maupun non-diklat, namun juga terkait dengan penegakan disiplin, penciptaan *database* yang akurat, *assessment center* dan penghitungan komposisi pegawai dengan cermat sehingga diperoleh kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BDK Cimahi sebagai salah satu unit eselon III memiliki pegawai sebanyak 31 orang. Secara garis besar komposisi pegawai BDK Cimahi per 31 Mei 2015 dapat dilihat pada diagram berikut:

Komposisi Pegawai BDK Cimahi

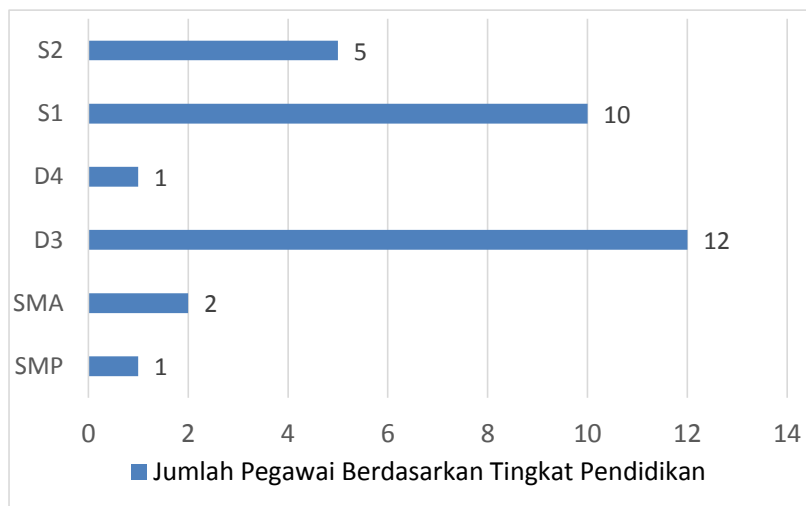


Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, SDM BDK Cimahi didominasi oleh pegawai laki-laki, yaitu 24 pegawai atau setara dengan 77,5% dari keseluruhan pegawai, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 7 atau setara dengan 22,5%.

SDM BDK Cimahi dilihat dari kelompok jabatan, terdiri dari: 1 orang pejabat eselon III, 3 orang pejabat eselon IV, 16 orang pelaksana, 3 pegawai tugas belajar, 7 widyaiswara. Apabila berdasarkan pangkat/golongan, sebaran pegawai terbanyak terdapat pada golongan II sejumlah 16 orang, dilanjutkan dengan golongan III sejumlah 9 orang, dan golongan IV sejumlah 6 orang.

Jika ditinjau dari jenjang pendidikannya, terdapat lulusan SMP sebanyak 1 orang, lulusan SMA sebanyak 2 orang, lulusan D3 sebanyak 12 orang, lulusan D4 sebanyak 1 orang, lulusan S1 sebanyak 10 orang, dan lulusan S2 sebanyak 5 orang, sebagaimana dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pada tahun 2015-2019, BDK Cimahi mengembangkan SDM melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi di bidang keuangan dan kekayaan negara. Diklat yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019 adalah diklat-diklat yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran strategis BPPK baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk melaksanakan program tersebut BDK Cimahi juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas program diklat BDK Cimahi dalam memenuhi kebutuhan unit-unit pengguna. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kegiatan yang dilakukan BDK Cimahi adalah sebagai berikut:

Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah:

- Sasaran Kegiatan (*Outcome*):
Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi.
- Indikator Kinerja Kegiatan:
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

Target kinerja BDK Cimahi sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran Renstra BDK Cimahi 2015-2019 ini.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparaturnya Kementerian Keuangan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misi BDK Cimahi sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan
BDK Cimahi 2015 – 2019

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,00)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	3.841,5	5.979,1	4.038,3	4.650,8	5.212,6
2	Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.	1.934,3	1.827	2.009,7	2.210,6	2.431,7

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BDK Cimahi tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BDK Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan dan kekayaan negara di daerah, khususnya Jawa Barat dan Banten. Dokumen ini menjadi pedoman bagi BDK Cimahi dalam mewujudkan visi: **menjadi pengelola pendidikan dan pelatihan terkemuka dalam menghasilkan pengelola keuangan dan kekayaan negara yang profesional dan berkelas dunia di daerah.**

Dokumen ini adalah dasar rencana operasional BDK Cimahi tahun 2015-2019 pada semua bidang di BDK Cimahi, meliputi: Seksi Penyelenggaraan, Seksi Evaluasi dan Informasi, dan Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal. Rencana strategis ini juga dapat menjadi landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum terhadap bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, memecahkan masalah utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, serta membangun kerja kelompok dan keahlian

Dalam keadaan terjadi perubahan strategis dalam lingkungan di luar prediksi sehingga rencana strategis mengalami kendala besar dalam implementasinya, dapat dilakukan perubahan atas inisiatif Kepala BDK Cimahi dengan persetujuan Kepala BPPK. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam *roadmap* yang dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk memantau keberhasilan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis ini.

No.	Nama Kegiatan	Output	Satuan	Target Kinerja					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pengukuran kualitas layanan	Index Kepuasan	-	80%	85%	90%	95%	95%	
2	Pengadaan sarana dan prasarana (Perangkat Pengolah Data)	LCD Proyektor	unit	-	5	-	-	-	Mengganti yang sudah usang
		Komputer	unit	-	7	7	-	30	Mengganti komputer karena telah habis masa pakai
		Laptop	unit	5	6	-	-	-	Mengganti Laptop karena telah habis masa pakai
		Printer	unit	-	-	5	5	-	Mengganti yang sudah usang
		<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	unit	-	-	8	-	-	
		Tab	unit	-	-	-	7	-	
3	Pengadaan sarana dan prasarana (Peralatan fasilitas perkantoran)	<i>Handycam</i>	unit	-	1	-	-	-	
		Kamera	unit	1	-	-	1	-	
		Closed Circuit Television (CCTV)	unit	-	-	7	-	-	Mendukung sistem pembelajaran yang baru
		<i>Air Conditioner (AC)</i>	unit	-	-	-	-	5	
		Televisi	unit	-	6	-	-	-	
		Kulkas	unit	-	-	3	-	-	
		Penghancur Kertas	unit	-	-	-	4	-	
		<i>Handy Talkie</i>	unit	-	5	-	-	-	
		Genset	set	-	1	-	-	-	
		<i>Wireless Microphone</i>	unit	-	-	8	-	-	
		Meja Kerja	unit	-	30	-	-	-	
		Kursi Kerja	unit	-	30	-	-	-	
		Sofa	set	-	6	-	-	-	
		<i>Vertical Blind/Gordyn</i>	m2	-	-	500	-	-	
		Kasur	unit	-	-	3	-	-	
		Lampu hias	unit	-	-	2	-	-	
		<i>Jet Pump</i>	unit	-	2	-	-	-	
		Karpet	m2	-	433.8	-	-	-	
		<i>Wallpaper</i>	m2	-	230.88	-	-	-	
		Panggung Aula	m2	-	15	-	-	-	
Lukisan	unit	-	-	-	5	-			
Lemari Arsip	unit	-	-	-	4	-			
<i>Whiteboard kecil</i>	unit	-	4	-	-	-			
Podium dari kaca	unit	-	-	1	-	-			
Jam ukuran Besar	unit	-	-	1	-	-			

No.	Nama Kegiatan	Output	Satuan	Target Kinerja					Keterangan
				2015	2016	2017	2018	2019	
		Kedap suara	m2	-	-	230.88	-	-	
		Buku + Rak	paket	-	1	-	-	-	
		Alat Fitnes	set	-	1	-	-	-	
		Kursi ruang tunggu (4 lajur)	unit	-	-	3	-	-	
4	Pengadaan sarana dan prasarana (kendaraan bermotor)	Motor	unit	-	-	2	-	-	
5	Pengadaan sarana dan prasarana (Layanan perkantoran)	Kaca patri	buah	-	-	5	-	-	
		Taplak	buah	-	-	5	-	-	
		Sajadah	unit	-	32	-	-	-	
		Arah kiblat	unit	-	32	-	-	-	
		Sikat gigi + odol	paket	-	32	-	-	-	
		Pintu toilet dan Keset	unit	-	-	18	-	-	
		Rehab. Ruangan Widyaiswara	m2	-	96	-	-	-	
		Rehab. Ruangan Rapat	m2	-	69.6	-	-	-	
		Rehab. Toilet	m2	-	90	-	-	-	
		Rehab. Kantin	m2	-	-	19.51	-	-	
		Rehab. Ruangan Laktasi	m2	-	15.96	-	-	-	
6	Pengadaan sarana dan prasarana (Gedung dan Bangunan)	Aspal jalan	m2	-	2475	-	-	-	
		Pembangunan tembok samping	m2	-	208.2	-	-	-	
		Partisi	m2	-	20	-	-	-	
		Kolam ikan	m2	-	-	20	-	-	
		Batu refleksi	m2	-	-	3	-	-	
		Kanopi	m2	-	-	20	-	-	
		Gudang arsip	m2	-	30	-	-	-	
		Rehab asrama	m2	-	1684	-	-	-	
		Rehab Mess + interior	m2	-	-	440	-	-	2 atau 3 mess dibuat menjadi guest house (VIP)
		Rehab Taman	m2	-	-	50	-	-	

Bandung Barat, Juni 2015
Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi

ttd.

Endang Widajati
NIP 19691019 199403 2 001